

**KINERJA NADZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF
DI KUA KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Ilmu Ahwal AL-syakhsiyyah



Oleh

TURISMANTO HADINATA
10521001073

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM - RIAU

TAHUN 1430 H / 2010 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“kinerja nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam ”***

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. . Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertical (Habluu Min Allah) dan horizontal (Habluu Min An-Nas). Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf). Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Kenyataan telah membuktikan bahwa pada mayoritas negara Islam, wakaf telah menjadi sumber dana yang potensial.

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, berdasarkan data Departemen Agama pada bulan mei 2004 jumlah tanah wakaf 402.845 lokasi dengan luas 1.556.672.406 m² . Namun kenyataan yang ada, wakaf yang ada di Indonesia dilihat dari segi sosial dan ekonomi memang belum dapat menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami antara lain adalah sumberdaya manusia (SDM) nadzir yang tidak profesional dan masih belum maksimal dalam menjalankan tugas.

DiKUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar hingga tahun 2010 ini telah terdaftar sebanyak 54 benda wakaf yang mayoritas berbentuk tanah untuk pembangunan masjid, mushalla, MDA, Pemakaman Muslim, dan lain sebagainya. Namun hingga saat ini pemanfaatan tanah wakaf ini belumlah optimal. Hal ini bisa dilihat dari pemanfaatan tanah yang hanya dipergunakan untuk pembangunan masjid sementara sisa lahan dari tanah wakaf itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk suatu hal yang lebih produktif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya SDM yang di miliki Nadzir yang mayoritas hanya tamatan Aliyah sederajat serta kurangnya minat dan tanggung jawab nadzir untuk benar-benar mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Berangkat dari persoalan diatas maka yang jadi pokok persoalan adalah bagaimana kinerja pengelola benda wakaf (nadzir) di Kecamatan kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum islam.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Kampar timur Kabupaten Kampar, yang menjadi populasinya adalah benda wakaf yang terdaftar di Kecamatan Kampar Timur sebanyak 54 buah, sedangkan sample untuk penelitian ini berjumlah 10 orang nadzir dan Kepala KUA Kecamatan Kampar Timur.

Sementara itu dalam mendapatkan data dilapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

Dari penelitian yang penulis lakukan didapati bahwa kewajiban nadzir selaku pengelola harta benda wakaf belumlah berjalan sesuai aturan yang ada sehingga nadzir hanya terkesan hanya sebagai pelengkap untuk mendapatkan AIW saja. Dan dari hasil wawancara terhadap sample terbukti 8 orang dari 10 orang sample tidak mengerti akan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai nadzir.

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 bahwa fungsi nadzir adalah sebagai lembaga yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Tentu saja hal ini akan bisa terlaksana jika nadzir-nadzir yang ditunjuk memiliki SDM yang memadai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBARAN PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang masalah..... 1

b. Pokok permasalahan..... 5

c. Batasan masalah 6

d. Tujuan dan kegunaan penelitian..... 6

e. Metode penelitian..... 6

f. Sistematika penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KUA KECAMATAN

KAMPAR TIMUR

a. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Kampar Timur..... 10

b. Struktur KUA 13

c. Personalia KUA 14

d. Mekanisme kerja KUA 14

e. Daftar harta benda wakaf beserta nadzir	17
--	----

BAB III KONSEP WAKAF

a. Pengertian wakaf.....	19
b. Dasar hukum wakaf.....	23
c. Rukun dan syarat wakaf	26
d. Macam-macam wakaf	34
e. Pemanfaatan wakaf	38

BAB IV KINERJA NADZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA

BENDA WAKAF DI KUA KECAMATAN KAMPAR

TIMUR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU MENURUT

HUKUM ISLAM

a. Kinerja nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum islam	41
b. Tinjauan hukum islam	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan	56
b. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangan lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam.¹

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertical (Habluu Min Allah) dan horizontal (Habluu Min An-Nas). Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf).

Di hari kemudian wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.

¹ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: 2007), h. 101

Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.²

Rasulullah saw bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له

Artinya: Apabila manusia wafat, maka terputuslan amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholih yang berdo'a untuk orang tuanya³.

Para ulama manafsirkan sabda Rasulullah saw : صدقة جارية (sedekah jariyah) dengan wakaf.

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989)

³ Muslim, *Shoheh Muslim*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1992), Juz 11, h.70

materi bagi orang yang mewakafkan. Kenyataan telah membuktikan bahwa pada mayoritas negara Islam, wakaf telah menjadi sumber dana yang potensial.

Dilihat dari sisi manfaat, dari dana wakaf pula fakir miskin dapat disantuni, lembaga-lembaga sosial tumbuh berkembang, rumah ibadah didirikan, sekolah-sekolah dan rumah sakit serta panti asuhan dibangun.

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, berdasarkan data Departemen Agama pada bulan Mei 2004 jumlah tanah wakaf 402.845 lokasi dengan luas 1.556.672.406 m²,⁴. apabila jumlah tanah wakaf itu dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Namun kenyataan yang ada, wakaf yang ada di Indonesia dilihat dari segi sosial dan ekonomi memang belum dapat menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat dipahami antara lain adalah sumberdaya manusia (SDM) nazhir yang tidak profesional dan masih belum maksimal dalam menjalankan tugas. Wakaf hanya digarap sesuai standar minimal, sehingga hasilnya belum maksimal atau paling tidak hanya kembali modal penggarapannya saja. Agar dana wakaf bisa bermanfaat oleh masyarakat banyak dan dapat menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, maka di dalam Islam harta wakaf harus dikelola dengan baik. Agar

⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, (Jakarta: 2004 th), h. 1

harta wakaf itu tetap bermanfaat dan tidak disia-siakan, maka dibentuk lah lembaga, ataupun perorangan yang dinamakan nazhir. Untuk menjamin harta benda wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dikelola dengan baik. Berdasarkan Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 PP NO. 28 Tahun 1977, nadzir mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai berikut:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang di atur oleh Menteri Agama.
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁵

Dalam pengelolaan harta benda wakaf pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta benda wakaf adalah nadzir wakaf yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru'. namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melastarikan manfaat dari hasil harta wakaf maka keberadaan

⁵ *Ibid.* , h. 502

nadzir sangat dibutuhkan, sebab di pundak nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf.

KUA Kecamatan Kecamatan Kampar Timur sebagai lembaga pengelola wakaf sama seperti KUA lain yang ada di seluruh Indonesia tentulah memiliki nadzir yang bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf, namun dalam hal menjalankan tugasnya nadzir yang ada terkesan hanya sebagai orang atau lembaga yang bertugas hanya ketika menerima harta wakaf dan setelah akta ikrar wakaf dibuat nadzir tidak lagi memperhatikan tugas-tugas yang seharusnya ia laksanakan,

Dari uraian di atas diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan Nadzir dalam mengelola dan mendayagunakan harta wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting menganalisa ***“KINERJA NADZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF DI KUA KECAMATAN KAMPAR TIMUR DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”***.

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana kinerja nadzir dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap kinerja nadzir dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur?

C. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitaian ini adalah bagaimana kinerja nadzir dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum islam.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja nadzir dalam pengelolaan benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur.
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kinerja nadzir dalam pengelolaan benda wakaf diKUA Kecamatan Kampar Timur.

2. Kegunaan

Adapun guna penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan acuan dan ilmu pengetahuan bagi para nadzir.
- b. Sebagai syarat untuk mengikuti dan mendapatkan gelar serjana.
- c. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan seluruh nadzir yang terdaftar di Kecamatan Kampar Timur, sedangkan

yang menjadi objek dari penelitian ini adalah kinerja pengelolaan benda wakaf oleh nadzir di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

3. Populasi Dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan nadzir yang terdaftar di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebanyak 54 orang. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar maka penulis mengambil 10 orang nadzir dan Kepala KUA sebagai sampel.

4. Sumber Data

Data-data yang di ambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data-data yang di peroleh dari KUA dan Nadzir yang ada di Kecamatan Kampar Timur
- b. Data skunder, yaitu data-data yang di peroleh dari masyarakat, buku-buku dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Abservasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka

dimana informan tidak merasa dirinya sedang di wawancarai sehingga informasi yang di berikan benar-benar murni tanpa di rekayasa.

6. Metode Analisa Data

- a. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan kenyataan dan fenomena yang ada kemudian di sajikan secara apa adanya.
- b. Deduktif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan penomena yang bersipat umum selanjutnya di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersipat khusus.
- c. Induktif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan dan penomena yang bersipat khusus selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersipat umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar dengan mudah penulisan ini di pahami, maka penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.
- BAB II : Mengungkapkan sekilas tentang KUA Kecamatan Kampar Timur yang terdiri dari Sejarah Berdirinya, Struktur dan Personalia serta Mekanisme Kerja.
- BAB III : Menguraikan tentang konsep wakaf yang terdiri dari Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan

Syarat Berwakaf, Macam-macam wakaf dan Pemanfaatan Wakaf.

BAB IV : Kinerja nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar ditinjau menurut hukum islam

BAB II
SEKILAS TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KAMPAR TIMUR
KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Kampar Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur terletak di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Dalam ruang lingkup tugas yang telah diprogramkan bergerak dibidang urusan agama yang berkembang dalam masyarakat baik pembinaan dibidang agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha menyebar luaskan serta memberdayakan segala peraturan.

Kantor Urusan Agama ini berada dalam kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kampar pada tahun 2005. Kampar Timur saat ini memiliki sembilan buah desa. Awal pembentukan Kecamatan Kampar Timur hanya memiliki enam desa (2005), Desa Kampar merupakan desa yang memiliki wilayah terbesar dan penduduk yang padat sehingga pada tahun 2007 Desa Kampar dimekarkan menjadi empat desa, dan tahun 2008, tiga desa pemekaran menjadi desa depenitif.¹

Seiring dengan lajunya pertumbuhan masyarakat maka semakin banyak pulalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan, maka untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Urusan Agama maka berdasarkan keputusan Menteri

¹ Profil dan data Kecamatan Kampar Timur tahun 2009

Agama RI. No: 10 tahun 2005, maka wilayah kerja Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Kampar dimekarkan, dan adapun KUA yang baru dimekarkan itu diantaranya adalah:

1. KUA Kec. Kampar
2. KUA Kec. Rumbio Jaya
3. KUA Kec. Kampar Utara
4. KUA Kec. Kampar Timur.²

Kantor Urusan Agama Kecamatan kampar Timur setelah didefenitifkan pada tahun 2005, untuk pertamakali kepala KUA nya adalah Darnis S.Ag.³

Pasal 732 menjelaskan :

- (1) Pembentukan KUA disuatu Kecamatan ditetapkan oleh menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.
- (2) Pembentukan KUA dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani.
- (3) Apabila dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tugas, kepala kantor wilayah departemen agama provinsi / setingkat dapat menetapkan bahwa tugas suatu KUA meliputi 2 (dua) kecamatan atau lebih.⁴

² Darnis S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur, *Wawancara*, (Tanggal 26 Agustus 2009)

³ Darnis S.Ag, *Ibid*.

⁴ Departemen Agama RI, *pedoman pegawai pencatat nikah*, (PPN), h. 265

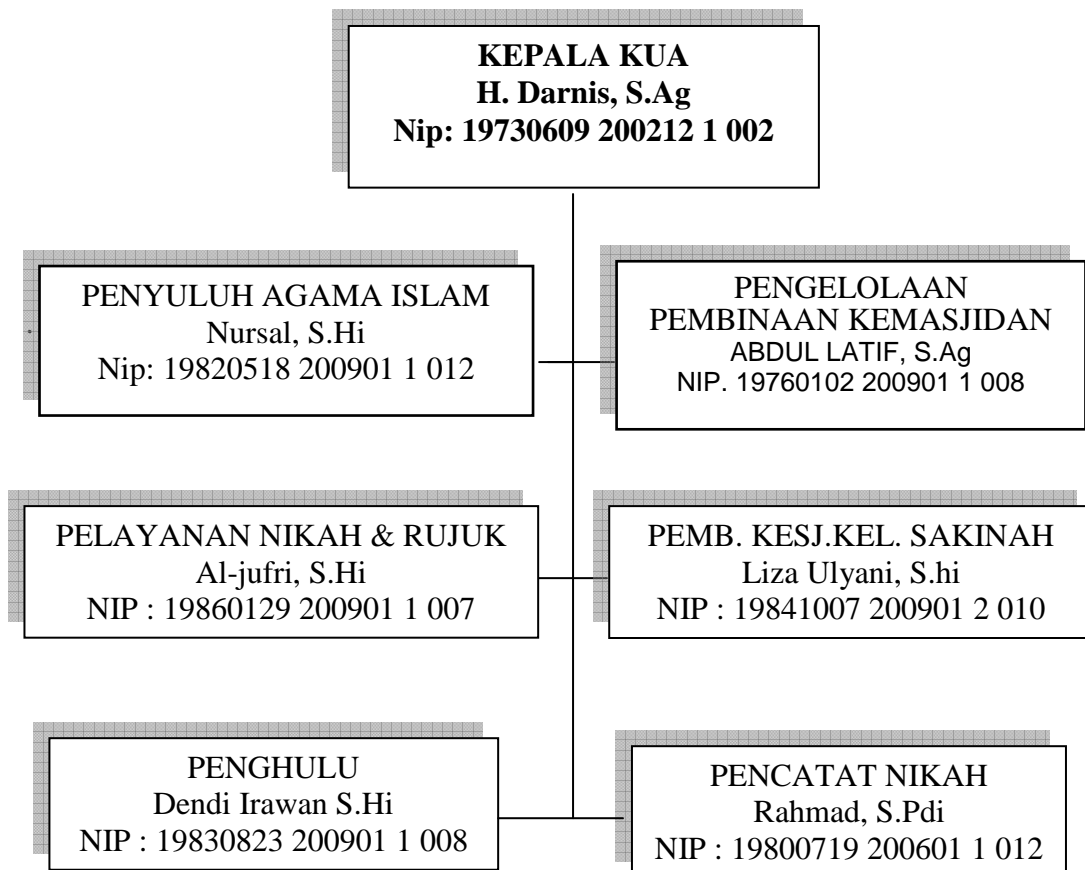
Sejarah tentang berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia, Departemen Agama melakukan tindakan kearah unifikasi dan sentralisasi secara integral dan Departemen-Departemen lain mengikuti tindakan tersebut. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama. KUA dibentuk diseluruh daerah sebagai cabang dari Kantor Pusat Nasional yang diciptakan oleh pemerintah militer Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor IN Landsche Zaken, yang pada waktu itu mempunyai cabang ditingkat Keprerisidenan, Departemen Agama kini membentuk KUA di daerah dengan jawataan pusat di Jakarta, Provinsi, Kabupaten, dan kecamatan. Sedangkan ditingkat Desa ada juga pejabat agama yang tidak termasuk dalam hierarkinya. (pejabat agama di Desa yang disebut Modin, Kaum, Kayim, lebai dan sebagainya adalah termasuk pamong Desa, yang administrasinya dibawah pemerintah umum). Sambil melayani tugas-tugas yang bersifat politik maupun Hukum agama, maka KUA di Kabupaten dan Kecamatan biasa menjadi pusat kegiatan Islam bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1950 pengawasan terhadap para pejabat ini berada ditangan pemimpin-pemimpin NU setempat⁵

Dari semula hubungan KUA dengan Pengadilan Agama selalu kritis, terutama diluar jawa maupun di jawa. Para pejabat Departemen Agama melihat bahwa KUA sebagai alat utama mencapai keseragaman didalam masalah hukum Islam. KUA di daerah mempunyai hubungan dengan Pengadilan Agama disebabkan sebagian dari tugasnya yang bersifat “peradilan”, contohnya, berkenaan dengan pertanggung jawaban atas

⁵ Daniels, Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, penerbit PT. Indonesia, Jakarta, Th. 1986, h. 99

pencatatan nikah, thalak, dan rujuk, pejabat KUA dapat menyelesaikan perselisihan antara suami istri sebelum diajukan ke Pengadilan⁶.

B. Struktur Kerja KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar



Sumber: Data KUA Kecamatan Kampar Timur

⁶ *Ibid*, h. 100

C. Personalia KUA Kecamatan Kampar Timur

TABEL 1

Daftar Pegawai KUA Kecamatan Kampar Timur

Kabupaten Kampar

No	Nama / NIP	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	H. DARNIS, S.Ag NIP.19730609 200212 1 002	Ka. Kua	S1 Ushuluddin
2	DENDI IRAWAN, S.HI NIP. 19830823 200901 1 008	Penghulu	S1 Syari'ah
3	RAHMAD, S.Pd.I NIP. 19800719 200901 1 012	Pencatat Nikah	S1 Tarbiyah
4	AL JUFRI, S.HI NIP. 19860129 200901 1 007	Pely. Nikah & Rujuk	S1 Syari'ah
5	LIZA ULYANI, S.HI NIP. 19841007 2009 2 010	Pemb. Kesj. Keluarga Sakinah	S1 Syari'ah
6	SABARUDIN, S.Kom NIP. 19841020 200901 1 008	Pengelola Statistik & Dokumentasi	S1 Teknik Informatika
7	NURSAL, S.HI NIP. 19820518 200901 1 012	Penyuluh Agama Islam	S1 Syari'ah
8	ABDUL LATIF, S.Ag NIP. 19760102 200901 1 008	Pengelolaan Pembinaan Kemasjidan	S1 Dakwah

Sumber: Data KUA Kecamatan Kampar Timur.

D. Mekanisme Kerja KUA

Kantor Urusan Agama merupakan sarana dan sentral pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang agama pada tingkat kecamatan. Khusus untuk tingkat Kecamatan Kampar Timur sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kampar maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur mengemban tugas yang sangat banyak, karena kepadatan penduduk yang berada dikecamatan ini, disertai pula dengan kekurangan tenaga pelaksana.

Adapun tugas-tugas yang harus diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur seperti juga Kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tugas Administrasi dan ketata usahaan
2. Pencacatan, pelaksanaan, dan pelaporan NTCR (Tugas Kepenghuluan)
3. Tugas kemesjidan dan perwakafan
4. Tugas badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4)
5. Tugas Pengembangan dan pembinaan kehidupan beragama (P2A)
6. Tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) serta kegiatan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan
7. Tugas Pelaksanaan Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS)
8. Tugas Pembinaan dan Bimbingan IPHI
9. Kependudukan dan kesehatan Masyarakat atau keluarga (UPGKJK)
10. Pendapatan dan Statistik di berbagai bidang.
11. Pembinaan dan pengembangan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)
12. Tugas pembinaan Kepegawaian dan Dharma Wanita
13. Dan tugas-tugas baru yang muncul dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan kegiatan dan tugas Kantor Urusan Agama.⁷

Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kampar timur dibantu oleh satu orang wakil PPN, enam

⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 275

orang pegawai kantor, ditambah lagi empat orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan di desa desa yang berjumlah sembilan desa.⁸

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989, tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), Menimbang :

- a. Bahwa karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu pelayanan oleh kantor urusan agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, thalak, dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya dipandang perlu meninjau kembali peraturan menteri agama nomor 6 Tahun 1983 dan memberlakukannya di seluruh Indonesia.
- b. Bahwa kehidupan beragam Islam di desa perlu dibimbing sehingga tumbuh berkembang dan semarak sebagai perwujudan integrasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bahwa untuk merealisasikan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu memantapkan peraturan Menteri Agama RI.⁹

⁸ Dendi Irawan, MA, Pegawai KUA Kampar timur, *Wawancara*, (27 Agustus 2009).

⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta : 2000), h. 249

E. Daftar Harta Benda Wakaf Beserta Nadzir di KUA Kampar Timur

Kabupaten Kampar

TABEL II

DAFTAR HARTA BENDA WAKAF

KECAMATAN KAMPAR TIMUR

N O	Lokasi Desa/Kelurahan	Luas M ²	Wakif	Penggunaan	Nadzir/Bada n Hukum
1	Kampar	1.581	H. Nurdin	Pemb. MDA	Rusmayuzar
2	Kampar	1.950	H. Nurdin	Pemb. Mesjid	Rusmayuzar
3	Kampar	3.100	Dalil Ahmad	Pemb. PP Al-Hidayah	H. Bachtiar Daud
4	Kampar	153	Hj. Zainab	Pemb. Musholla Al- Hidayah	H. Melati
5	Sungai Tarap	850	Baarib	Pemb. Musholla	Hatta
6	Sungai Tarap	441	Raziyah	Pemb. Mesjid Al-Ihsan	Surayah
7	Sungai Tarap	7.680	Kadus III Tj. Alai	Kuburan Masy. Islam	Bastian
8	Sungai Tarap	574	H.M.Khatib	Pemb. MDA Darul Ulum	H.M. Khatib
9	Sungai Tarap	961	H. Abasri	Pemb. Mesjid	H. Muslim
10	Tanjung Bungo	10.286	H.Mohd.Yus uf	Pemb. Mesjid Baitul Amal	M.Yunus
11	Tanjung Bungo	1.750	M.Yunus	Pemb. Mesjid Taqwa	Rusli, HS
12	Tanjung Bungo	24.375	Rusli Has	Kuburan Masy. Islam	Kasim Ismail
13	Tanjung Bungo	72	H. Imam Saidi	Pemb. Surau Nurul Yakin	Sudar
14	Tanjung Bungo	2.816	Syamsuar K	Pemb. Mesjid Ar- Rahman Danto	Jalunis
15	Tanjung Bungo	440,75	Amir	Pemb. TK Al-Hidayah Tarok	Amir
16	Tanjung Bungo	664	Idris	Pemb. Surau Ubudiyah	Darwis, BE
17	Tanjung Bungo	294,69	Idris	Kuburan Masy. Islam	Syahrin
18	Sawah Baru	2.854	H. Baharuddin Imam	Pemb. Mesjid Baiturrahman Sawah Baru	H. Hendri, S.Pd
19	Koto Prambahan	625	Hasan	Pemb. Musholla Ubudiyah	Daramis
20	Koto Prambahan	700	Nanan	Pemb. Mesjid	H.Zamzami Nas
21	Koto Prambahan	1.050		Pemb.MDA	Husin Tualib
22	Koto Prambahan	1.500	Juni	Pemb. Mesjid	Ihim
23	Koto Prambahan	792	Suharmi	Pemb. Mesjid An- Nahdha Pd. Merbau Timur	Afrizal
24	Koto Prambahan	3.712	Mansyur DT	Pemb. Mesjid Muttaqin	Tawi
25	Pulau Rambai	600	Zulkifli. Ds	Kantor KUA Kampar Timur	Darnis, S.Ag

26	Pulau Rambai	644	H.M.Said	Pemb. Mesjid Nurul Falah	Baharudin Yakup
27	Pulau Rambai	132	H.Aklumah	Pemb. Musholla Al-Hidayah	Baharudin
28	Pulau Rambai	1.200	Ismail Arif	Pemb. Mesjid Darussalam	Saruan
29	Pulau Rambai	58.750	Kasim	Kuburan Masy. Islam	Ahmad
30	Pulau Rambai	750	Halimah	Pemb. Mesjid Al-Jihad	Zulizar
31	Pulau Rambai	225	Hj.Zubaidah	Pemb. Mesjid	Baharudin
32	Pulau Rambai	276	Imam Chairi	Pemb. Surau Al-Ikhlas	Lajim
33	Pulau Rambai	2.000	Tuaman	Pemb.Mesjid Al-'Alaa	E.M. Ilyas
34	Pulau Rambai	2.500	Tuaman	Pemb. MDA	E.M. Ilyas
35	Pulau Rambai	15.000	Ahmad.R	Pemb. MTs	H. Saruan
36	Pulau Rambai	1.360	Darwis	Pemb. Mesjid Al-Ikhlas	Mansur
37	Pulau Rambai	972	Mizar S	Pemb. MDA Bustanul Ulum	H. M. Nazir
38	Pulau Rambai	240	Rofiah	Pemb. Surau / Musholla Ubudiyah	H. Syamsuar
39	Pulau Rambai	816	Dotiok	Pemb. Mesjid	H. Samsuar
40	Pulau Rambai	352	H. Adhan	Pemb. Musholla	H. Darwis
41	Pulau Birandang	481	Muhammad	Pemb. Mesjid Al-Huda	H. Jamal
42	Pulau Birandang	600	M.Saleh	Pemb. Mesjid Ansyarullah	M. Nazir
43	Pulau Birandang	480	H.Umar	Pemb. Mushola Muhamdiyah	Talib
44	Pulau Birandang	1.600	H.M.Yusuf	Pemb. Mesjid Ar-Rahman	Maazah
45	Pulau Birandang	440	H.Abdullah	Pemb. Masjid Babusalam	Lahaman
46	Pulau Birandang	15.000	H.M. Khatib	Kuburan Muslim	Ramli
47	Pulau Birandang	308	Usman	Pemb. MDA	Miahir
48	Pulau Birandang	16.500	Nursing Sialip	Pemb. Mesjid Taqwa	Miahir
49	Pulau Birandang	300	H.M. Taib	Balai Desa	Buya Andak
50	Pulau Birandang	2.000	H. Wahib	Keperluan umum	Abu Samah
51	Pulau Birandang	500	Porin	Pemb. Mesjid Nurul Huda	Taral
52	Pulau Birandang	304	Saranan	Pemb. Musholla	Abdul Ajis
53	Deli Makmur	320	Budi Cahyono	Pemb. Mesjid Nurul Iman	Marah
54	Deli Makmur				Fathul Karim

Sumber : Data KUA Kecamatan Kampar timur

BAB III

KONSEP WAKAF

A. Pengertian Wakaf

1. Pengertian dari segi Etimologis

Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab **وقف - يقف - وقفا** secara etimologis berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan.¹ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab merupakan sinonim dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang menurut bahasa juga berarti menahan. Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda, yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.

Menurut kamus bahasa Indonesia, wakaf ialah memperuntukkan sesuatu bagi kepentingan umum, sebagai derma atau kepentingan yang berhubungan dengan agama.²

2. Pengertian dari segi Epistemologis

Secara Epistemologis, yang dimaksud dengan wakaf menurut ulama fiqih ialah sebagai berikut :

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Krapyak, tt) h. 2033-2034

² Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka,1988), h.1008.

a. Menurut mazhab Hanafi :

الوقف : حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير

Artinya: “Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (wakif) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebaikan”.³

Lebih lanjut, menurut mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya.⁴ Dengan demikian, bagi Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain, mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu :⁵

1. Berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali.
2. Wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat.
3. Harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus : Dar al Fikr, 1985), Juz VII h.153.

⁴ *Ibid*, h.169

⁵ *Ibid*, h 153-154.

b. Menurut mazhab Maliki:

الوقف : جعل المالك منفعة مملوكة, ولو كان مملوكا بأجرة, أو جعل غلته
كدرهم لمستحق بصيغة, مدة ما يراه المحبس

Artinya “Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif)”.⁶

Berdasarkan definisi ini seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta pada diri sang wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan *sighat* (akad) wakaf. Oleh karenanya bagi Maliki, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat mazhab Maliki bahwa pemilikan harta wakaf itu tetap berada di tangan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan manfaat bagi *maukuf alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) ialah Hadits Rasulullah SAW : “Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”.⁷

⁶ *Ibid*, h.155. Lihat. Sayyid Ali Fikri, *al-Mu'amalah al- Madiyah wa al Adabiyah*, (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938), Juz II, h.304.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h.169.

c. Menurut mazhab Syafi'i:

الوقف : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته
على مصرف مباح

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.

Berdasarkan pengertian ini, mazhab Syafi'i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik *nazir* (pekerja pengelola wakaf).⁸

d. Menurut mazhab Hanbali :

الوقف : تحبیس مالک مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه
وغيره في رقبته لنوع من أنواع التصرف تحبیساً يصرف ريعه الى بر تقرباً الى الله

Artinya: “Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah”.⁹

Dari pengertian ini, mazhab Hanbali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya. Hadis Rasulullah

⁸ Asy Syarbaini, *op.cit*, h.389.

⁹ Sayyid Ali Fikri, *op.cit*, h.312.

SAW: “*tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya*” dipahami oleh mazhab Hanbali, bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan kepada siapa pun.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi sang wakif.

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an, maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf ialah :

1. Dasar hukum dari al-Qur'an :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹⁰ Sayyid Ali Fikri, *Ibid*, h.312.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹¹ (QS. Ali Imran:92).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”¹² (QS. Al-Baqarah:267).

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹³ (QS. Al-Hajj: 77).

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

2. Dasar hukum dari hadits Rasulullah SAW :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : اذا مات

ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو

ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh “(HR. Muslim).¹⁴

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang :CV Toha Putra, 1989), h. 91

¹² *Ibid*, h. 67

¹³ *Ibid*, h. 523

¹⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut ; Dar al Fikr, 1992) Juz II, h. 70.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW sedekah jariyah dengan wakaf. Kemudian sebuah hadits:

عن ابن عمر رض الله عنهما قل أصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقل له رسل الله صلى الله عليه وسلم "إن شئت حبست أصلها وتصدق بها" فتصدق عمر أنها لايباع ولاتوهب ولا تورث قل وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, r.a., bahwa Umar bin Khathab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah Saw untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah Saw : Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut”.¹⁵

¹⁵ Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Juz.VI, h.233. Beirut : Dar al Fikri, 1415/1995.

Demikian di antara beberapa nash Al Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan landasan utama disyariatkannya wakaf dalam Islam. Hanya saja, jika kita cermati dari nash-nash hadits yang menjadi sumber hukum wakaf, maka tampak sedikit sekali jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang ditetapkan berdasarkan ijtihad fuqaha yang didasarkan pada pertimbangan istihsan, masalah dan urf.¹⁶ Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Wahbah al Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al Islamy Wa Adilatuhu*.¹⁷ Karenanya, wakaf merupakan salah satu konsep fiqh ijtihadi. Artinya ia, sebagai hasil ijtihad yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta. Konsep tersebut muncul sebagai respon dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang pertanyaan Umar bin Khattab mengenai pemanfaatan tanahnya di Khaibar. Permasalahan tentang wakaf memang tidak dijelaskan secara tegas didalam al-Qur'an. Kendati demikian para mujtahid, sebagai para pemuka umat Islam, berupaya mengembangkan lebih lanjut mengenai masalah tersebut dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an serta diikuti oleh beberapa hadits yang mendukung.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Para fuqaha sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Hanya saja mengenai jumlah rukun terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha, menurut mazhab Hanafi rukun wakaf hanya satu yaitu

¹⁶ *Istihsan, masalah dan urf* ialah Bagian dari Metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh para ulama Fiqh

¹⁷ Wahbah al Zuhaili, *op.cit*, 157.

sighat (pernyataan pemberian wakaf),¹⁸ sementara Jumhur Ulama, yakni kalangan mazhab Syafi’I, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat¹⁹ sebagai berikut :

1. Wakif, yaitu orang yang mewakafkan
2. Maukuf, yaitu barang / harta benda yang diwakafkan
3. Maukuf alaihi, yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf
4. Shighat, yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya

Tiap-tiap rukun wakaf memiliki syarat-syarat tertentu, mengenai hal itu akan diutarakan dibawah ini :

a. Syarat-syarat wakif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya, kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu :

- a.1. Berakal sehat/sempurna. Orang yang berwakaf harus memiliki akal yang sempurna/sehat, oleh karenanya tidak sah hukum wakaf yang diberikan oleh seorang yang tidak sempurna akalnya (orang gila/seumpamanya). Demikian pula tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang yang lemah akalnya yang diakibatkan oleh sakit atau lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan

¹⁸ *Ibid*, h. 159

¹⁹ *Ibid*, h. 159. Lihat juga, Asy-Syarbaini, *OP-cit*, h. 376

sah atau tidaknya wakaf yang diberikan oleh seseorang yang dalam keadaan mabuk, sebahagian pendapat mengatakan tidak sah dengan menganalogikan kepada orang gila, dan sebahagian lainnya membolehkan.

- a.2. Dewasa/Baligh. Orang yang berwakaf itu harus cukup umur/baligh dalam hal ini umumnya ulama beranggapan bahwa seseorang dianggap cukup umur apabila telah berumur 15 tahun, sebagaimana yang dipraktekkan di Mesir
- a.3. Cerdas/rasyid. Orang yang berwakaf diharuskan cerdas, dalam arti memiliki kecakapan dan kematangan dalam akad serta tindakan lainnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan wakaf seorang yang bodoh atau lalai, karena dianggap akalunya tidak sempurna dan tidak cakap menggunakan hak miliknya.
- a.4. Merdeka (pemilik sebenarnya), orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik sebenarnya. Oleh karena itu tidak sah wakaf seorang budak sahaya, demikian pula mewakafkan milik orang lain, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.²⁰

b. Syarat Maukuf (Barang Yang Diwakafkan)

Benda-benda yang akan diwakafkan, dianggap sah sebagai harta wakaf, jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁰ Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, (Beirut: Darul Fikri, tt), h. 44

b.1. Benda yang akan diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak, harus memiliki nilai secara ekonomi, tetap zatnya dan dibolehkan memanfaatkannya menurut ajaran Islam. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan suatu manfaat benda tanpa bendanya, seperti manfaat benda yang disewa atau diwasiatkan, atau mewakafkan suatu yang tidak tunai, seperti mewakafkan pakaian yang masih ada pada orang lain.

b.2. Harta benda yang akan diwakafkan harus jelas wujud dan batasan-batasannya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.²¹

c. Syarat Maukuf Alaihi (sasaran yang berhak menerima manfaat wakaf)

Sayyid Sabiq membagi sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu : Wakaf Khairi, wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakaf nya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, dalam arti sesuai dengan syariat Islam. dan Wakaf dzurriy, wakaf yang walinya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluarga dan keturunannya.²²

Selanjutnya para ahli fiqih membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bahagian yaitu :

c.1. Kepada yang tertentu

²¹ Muhammad Dawud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), h. 86

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kuwait: Darul Bayan, 1971), Jilid III, h. 378

Menurut Mazhab Hanafi penyaluran wakaf tersebut sah baik kepada orang yang diketahui maupun yang tidak diketahui, apakah ia muslim atau kafir dzimmi. Akan tetapi penyaluran wakaf tersebut tidak boleh kepada gereja atau kafir harbi.²³

Mazhab maliki berpendapat, bahwa wakaf sah ditujukan kepada orang yang mempunyai hak memiliki, baik itu kepada sesuatu yang sudah nyata ada atau yang tidak nyata, mengenai objek wakaf yang berupa diri sendiri, Mazhab maliki tidak membolehkan, meskipun hal tersebut bersama orang lain yang bukan ahli waris. Seperti seorang berkata, “aku wakafkan barang ini untukku dan sipulan”.²⁴

Mazhab Safi’I berpendapat objek wakaf tersebut berupa orang perorangan atau lebih, maka disyaratkan penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Dengan demikian mazhab syafi’I tidak memperbolehkan wakaf yang ditujukan suatu objek yang belum ada seperti janin, begitu pula tidak boleh diberikan kepada sesuatu yang tidak jelas, dan juga tidak boleh berwakaf untuk diri sendiri, orang murtad, dan kafir harbi, namun dibolehkan berwakaf kepada kafir dzimmi tertentu.²⁵

Pendapat mazhab Hanbali pada dasarnya hampir sama dengan pendapat mazhab Safi’I, diantaranya mazhab Hanbali mensyaratkan agar

²³Wahbah Zuhaili *Op. Cit*, h. 190

²⁴ *Ibid*

²⁵ Asy-Sarbaini, *Op. Cit*, h. 279

tujuan wakaf itu harus kepada orang yang telah dapat memiliki harta yang diwakafkan pada saat diberikannya wakaf, dan objeknya juga harus jelas ada, demikian pula wakaf tidak boleh ditujukan kepada seorang hamba dan janin yang ada dalam kandungan dan juga tidak boleh untuk kafir harbi.²⁶

c.2. Tidak tertentu atau umum

Mengenai tujuan wakaf yang bersifat umum dan yang tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, para fuqaha sepakat bahwa tujuan wakaf tersebut harus jelas diketahui dan untuk kebajikan,²⁷ hanya saja menurut ulama Syafi'iyah tidak diharuskan adanya unsur penerimaan(qabul) secara khusus dalam hal wakaf yang ditujukan kepada objek yang bersifat umum, seperti masjid dan lembaga-lembaga pendidikan social.²⁸

c.3. Sighat (Pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf)

Sighat wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda baik ucapan, isyarat, atau tulisan pada saat memberikan wakaf dan adanya pernyataan penerima wakaf atas pemberian, maka dengan pernyataan itu terlepaslah hak wakaf atas benda yang telah diwakafkan nya itu, dan tidak ada lagi haknya atas benda itu untuk melakukan perbuatan hukum.

²⁶ Mansur ibnu Yunus, Al-Bahuti, *kasyaf Al-Qana'an Al-Matan Al-Iqna'*, (Beirut: Darul Fikri, 1982), Juz 4, h. 250

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit*, h. 195

²⁸ Asy Syarbaini, *Op.Cit*, h. 195

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan syarat-syarat sighat menurut pandangan ulama sebagai berikut :

Menurut Sayyid Sabiq adalah :

ويصح الوقف ويتعقد باحدين امرين : الفعل الرد عليه كان بني مسجدا
ويؤذن للصلاة فيه, وهو ينقسم الى صريح وكناية, فالصريح مثل قول
الواقف وقفت وجبست وسبلت وابيت كائن يقول تصدق تاءولا به
الوقف.

Artinya: “Wakaf sah melalui salah satu dua cara, yaitu perbuatan, seperti membangun masjid dan mengizinkan shalat didalamnya, kedua perkataan terbagi kepada dua, yaitu sarikh dan kinayah, lapaz sharikh seperti aku wakafkan, aku tahan manfaatnya, aku jadikan untuk sabilillah, dan aku kekalkan, sedang lapaz kinayah seperti kata wakaf : aku sedekahkan (akan tetapi ia berniat wakaf)”.²⁹

Menurut Abu Bakar al-Jaziri

ان يكون التوقف بنص صريح كوقف وحبس او تصدق

Artinya: “Bahwa adalah perwakafan itu dilaksanakan dengan nash yang sarikh seperti mewakafkan, menahan atau menyedekahkan”.³⁰

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lapaz (sighat) dalam perwakafan merupakan penentu terjadi atau tidaknya perwakafan. Sehingga lapadz wakaf dapat dibagi kepada dua bahagian yaitu sharih dan kinayah, jika salah satu dari kedua lapaz tersebut telah digunakan maka perbuatan wakaf telah sah.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 381

³⁰ Abu bakar Al-Jaziri, *Minhaj Al-Muslimin*, (Beirut: Darul Fikri, tt), h. 336

Walaupun secara satu persatu penulis telah menyimpulkan, tetapi secara keseluruhan dapat dirangkum bahwa persyaratan perwakafan itu adalah:

- a. Sighat harus mengandung persyaratan bahwa wkaf itu bersifat kekal (ta'bid, wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab amalan wakaf untuk selama-lamanya. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan keadaan untuk selamanya dalam wakaf, boleh hanya dalam waktu tertentu, sehingga apabila habis masanya, wakif bisa mewakafkan kembali hartanya kepada orang lain yang membutuhkan nya.
- b. Sighat harus mengandung arti yang tegas dan tunai, untuk itu sighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu atau masa yang akan datang, sebab akad wakaf mengandung ketentuan pemindahan hak milik pada saat akad berlangsung, kecuali mazhab Maliki yang membolehkan wkaf yang dikaitkan dengan syarat dan penangguhan realisasi pada masa yang telah ditetapkan oleh orang yang berwakaf.
- c. Sighat harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memiliki, seperti mewakafkan sesuatu dengan syarat ia dan orang lain boleh mengambilnya kapan saja dikehendaki.
- d. Sighat tidak boleh diikuti dengan syarat yang membatalkan, bila terjadi perbuatan wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut

D. Macam-macam wakaf

Setelah dikemukakan rukun dan syarat-syarat wakaf selanjutnya akan dibahas macam-macam wakaf, wakaf pada umumnya dibagi kepada dua macam yaitu wakaf keluarga (wakaf ahli) yang disebut juga wakaf khusus, dan wakaf Khairi atau wakaf umum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh para fuqaha berikut :

والوقف احيانا يكون على الاحفار والاقارب ومن بعدهم الى فقراء ويسمى هذا بوقف الاهلي الزري وحيانا يكون الوقف على ابواب الخير بتداء ويسمى بوقف الخير

Artinya: “Wakaf itu kadang kala untuk anak cucu, kaum kerabat, kemudian untuk sesudah mereka hingga fuqara’ dan ini dinamakan wakaf ahli atau dzurri. Dan kadang kala wakaf yang diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata dan ini dinamakan wakaf khairi.”³¹

Menurut Muhammad Jawab Mughniyah:

قسم الا مامية القف الى نوعين ... الاول الوقف الخاص وهو ماكان ملك للموقوف عليهم اي الذين يستحقون استمائه والانتفاع به ومنه الوقف الزري والوقف على العلماء والفقراء الثاني والوقف العام وهو ما اريد منه انتفاع العامى كل الناس الكافة خاصة ولا صغة معين

Artinya “Imamaiyah membagi wakaf kepada dua macam yang pertama wakaf khusus yaitu suatu harta yang diperuntukkan sebagai milik bagi pihak yang menerima wakaf. Artinya orang-orang yang berhak mengambil buah dan hasilnya dan diantaranya wakaf dzurri, dan wakaf atas ulama, dan fakir. Dan yang kedua wakaf

³¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 378

umum yaitu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia secara umum, bukan untuk golongan tersendiri dan bagian tertentu.”³²

Berdasarkan keterangan-keterangan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf itu dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu wakaf khairi, wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan wakaf ahli, wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan kedua macam bentuk wakaf itu secara terperinci:

1. Wakaf Ahli (wakaf keluarga)

Wakaf ahli merupakan wakaf yang digunakan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-orang khusus maka wakaf ini juga dinamakan wakaf khusus. Salah satu contoh wakaf ahli yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. Adalah wakaf yang dilakukan oleh Abu Thalha sesuai dengan hadist dari Anas yang diriwayatkan oleh Muslim.

عن انس ان ابا طلحة قال يا رسول الله يقول لن تنالو بر حتى تنفقوا مما تحبون
وانا احبا موالى ببيرها وانما صدقة الله ارجو ببيرها وذكره عند الله فسنعها
يا رسول الله حتي اراك الله فقال بح,بح ذلك مال الراجح مرتين وقد سمعت
اراك فجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله فعنسها ابو طلحة
فواقربه وري عمه (رواه مسلم)

Artinya “Dari Anas sesungguhnya Abu Thalha berkata: Ya Rasulullah bahwa Allah berfirman : kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian

³² *Ibid*, h. 378

harta yang kamu cintai, sedangkan harta yang saya cintai adalah bairuha dan akan saya sedekahkan karena Allah, yang akan saya harap kebbaikannya. Dan simpanan pahala disisinya maka tentulah sedekah itu sebagaimana yang anda sukai ya Rasulullah, lantas Rasulullah menjawab boleh,boleh (bagus sekali bukan main), itulah harta yang paling menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang anda katakan (tentang bairuha itu), menurut pendapatku agar anda mejadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat , Abu Thalhah berkata : aku kerjakan ya Rasulullah, lalu Abu Thalhah membagi-bagikan kepada kerabatnya dan kepada anak pamannya.”³³(HR. Muttafaqun Alaihi)

Yang dimaksud anak paman dalam hadist diatas adalah Hasan bin Tsabit dan Ubai bin Ka’ab sesuai dengan penjelasan al-Syaukani berikut ini:

اني جعلت انها ببرها لله فقال اجعلها في قريبك قال فجعلها في حسن بن ثابت
وابي بن كعب (رواه احمد ومسلم)

Artinya “Sesungguhnya aku jadikan kebunku di bairuha untuk Allah lalu rasulullah berkata : jadikanlah (kebun itu) untuk karib kerabatmu, berkata Anas lalu Abu Thalah menjadikan kebun itu untuk Hasan bin Tsabit dan Ubaid bin Ka’ab”.³⁴ (HR. Ahmad dan Muslim)

Berdasarkan hadist diatas jelaslah bahwa wakaf adalah milik Allah Swt, dan wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kaum kerabat, yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli adalah orang-orang yang tersebut dalam sighat wakaf.

2. Wakaf Khairi (Wakaf Umum)

Wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan bagi orang tertentu, wakaf khairi inipun

³³ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut ; Dar al Fikr, 1992) Juz II, h. 401

³⁴ Muhammad Ali Al-Syauqani, *Nailul Autar*, (Beirut: Darul Fikri,1953), h. 127

sudah diamankan oleh kaum muslim ketika Rasulullah Saw masih hidup
hal ini dapat diketahui dari hadist Anas :

عن انس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وامر
ابناء المسجد فقال يا بني حجار ثامنوني رحئكم هذا قالوا لولا والله لانطلب

ثمنه الا الى الله

Artinya “Dari Anas ra. Dia berkata: ketika Rasulullah datang ke Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid beliau berkata : wahai Bani Hajar tentukanlah harga kebunmu ini, mereka berkata: Demi Allah kami tidak akan minta harganya kecuali kepada Allah”.³⁵

Untuk mengetahui bentuk-bentuk wakaf yang dilakukan oleh seseorang apakah itu wakaf ahli atau wakaf khairi hal ini dapat diperhatikan ketika ia mengucapkan sighat wakaf tersebut, apabila sighat telah diucapkan dan wakaf itu telah sah maka harta atau benda wakaf mesti digunakan sesuai dengan tujuan yang di maksud oleh siwakif selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam

Dalam hadist Anas diatas diterangkan bahwa Bani Hajar telah mewakafkan kebunnya untuk membangun mesjid, karena mereka tidak mau untuk menentukan harga kebun tersebut dan kebun tersebut hanya Allah yang menentukan harganya (diserahkan untuk kepentingan agama Allah Swt), untuk mewakafkan harta mereka pada jalan Allah karena manfaatnya banyak sekali untuk kemaslahatan umum.

³⁵ *Ibid*

Menurut laporan pengelolaan wakaf di Mesir, sampai saat ini kedua macam wakaf tersebut masih dipraktekkan,³⁶ termasuk dibeberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim, hanya saja bila ditinjau dari sudut banyaknya manfaat wakaf yang dapat diterima oleh masyarakat, tentu wakaf khairi lebih banyak dirasakan masyarakat karena sifatnya yang tidak terbatas untuk keluarga semata.

E. Pemanfaatan Wakaf

Pemanfaatan wakaf tidak dapat dilepaskan dari bentuk harta yang diwakafkan, menurut catatan sejarah pemanfaatan wakaf pada masa Rasulullah masih sangat sederhana karena karekteristik harta yang diwakafkan pada saat itu, hampir seluruhnya berupa harta tetap berupa tanah dan bangunan. Menurut Hasan Langgulung,³⁷ abad ke-8 dan ke-9 hijriah selain menjadi zaman kejayaan Islam juga dipandang sebagai zaman keemasan wakaf, pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda yakni mesjid, mushallah, sekolah, tanah, pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, dan pangkas rambut, gudang beras, dan lain-lain. Saat itu harta wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk menyediakan layanan gratis, seperti mesjid digunakan tempat ibadah , sekolah gratis bagi yang itdak mampu, namun juga sebagai penghasil dana, seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan uang sewa.

³⁶Direktorat Urusan Agama Islam Depag RI, *Laporan hasil training pengelolaan wakaf di Mesir*, 2001

³⁷Hasan Langgulung, *Azas-azas Pendiddikan Islam*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 2000), h. 178

Menurut catatan sejarah wakaf dalam Islam, penghasilan yang diperoleh dari wakaf disalurkan untuk hal-hal berikut ini :

1. Untuk masjid, yaitu penghasilan yang diperoleh dari wakaf paling sering diwakafkan untuk mesjid, termasuk didalamnya gaji imam, guru-guru pelajaran Islam, dan khatib.
2. untuk pendidikan, bidang ini secara umum menempati urutan kedua penerima hasil wakaf. Dana wakaf untuk pendidikan biasanya meliputi perpustakaan, buku, gaji para guru dan staf, beasiswa serta penelitian ilmiah, salah satu contohnya adalah universitas Al-Azhar di Kairo yang dibangun pada tahun 972 hijriah dengan dibiayai dari hasil wakaf.
3. Untuk orang-orang miskin, mereka yang membutuhkan, yatim piatu, orang-orang dalam penjara dan seterusnya. Layanan kesehatan juga termasuk penerima hasil wakaf yang meliputi: pembangunan rumah sakit dan biaya bagi para Dokter, pekerja rumah sakit dan pasien, salah satu contoh rumah sakit untuk layanan kesehatan adalah rumah sakit anak syisli di Istanbul yang didirikan pada tahun 1898.³⁸

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri seberapa besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf dan tidak sedikit pula dana dari penghasilan wakaf tersebut disalurkan untuk kepentingan umat, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, lembaga pendidikan dan layanan kesehatan bagi yang tidak mampu. Salah satu contoh dana dari penghasilan wakaf yang dimanfaatkan untuk

³⁸ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: 2007), h. 108

pendidikan ialah wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo di Jawa Timur, dan salah satu contoh layanan kesehatan Cuma-Cuma adalah LKS dompet dhu'afa yang bangunan dan operasionalnya dibiayai oleh dana Ziswaf.

Dengan demikian wakaf dan segala manfaatnya telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah. Hal tersebut tidak terlepas dari inti ajaran yang terkandung dalam wakaf itu sendiri, yakni semakin banyak manfaat harta wakaf dinikmati orang, maka semakin besar pahala yang mengalir kepada pihak yang berwakaf.

BAB IV

KINERJA NADZIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

DI KUA KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR

DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Benda Wakaf Di Kecamatan Kampar Timur

Dalam pengelolaan harta benda wakaf, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta benda wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh ulama tidak mencantumkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melastarikan manfaat dari wakaf, maka keberadaan nadzir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada posisi sentral. Sebab dipundak para nadzirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara dan mendayagunakan harta benda wakaf.

Adapun tugas tugas Nadzir antara lain sebagai berikut:¹

- a. Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf) itu.
- b. Membagikan hasil harta wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- c. Memelihara harta wakaf.

¹ Muhamamad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi, *Ahkam al-Waqf fi Syari'at al-Islamiyah*, (bagdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977), juz 2, h. 187-203

Kewajiban Nadzir menurut peraturan pemerintah pasal 7 jo pasal permenag No 1 Tahun 1978 jo angka IV/C peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep. D/75/78 sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi:
 - a. Menyimpan dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b. Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
 - c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan Ikrar Wakaf.
 - d. Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi wakaf meliputi:
 - d.1 Buku catatan tentang wakaf tanah, bentuk W.6
 - d.2 Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut bentuk W. 6, a
 - d.3 Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf bentuk W.6,b
2. Membuat laporan hasil catatan keadaan tanah wakaf yang di urusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu, pada akhir bulan Desember setiap tahun kepada KUA setempat yang merupakan rekapitulasi dari bentuk W. 6, W. 6, a dan W. 6, b.
3. Memberikan laporan perubahan anggota nazhir, apabila ada salah seorang anggota nadzir:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri

- c. Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir
 - d. Tidak memenuhi syarat lagi
 - e. Tidak dapat lagi melakukan kewajiban.
4. Mengajukan permohonan kepada kanwil Departemen Agama cq. Kepala Bidang penyelenggaraan Haji, Zakat dan Umrah melalui kepala KUA dan kantor Departemen Agama Kabupaten apabila di perlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan lain.
 5. Mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui kepala KUA, Kandepag dan kanwil Departemen Agama dengan memberikan keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendaknya.
 6. Melaporkan kepada bapak Wali Kota Kepala Daerah cq kepala Sub BPN setempat apabila terjadi perubahan status tanah wakaf perubahan penggunaannya untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
 7. Melaporkan kepada Kepala KUA tentang hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusnya.
 - a. Pencatatan tanah wakaf oleh kepala sub Direktorat BPN setempat.
 - b. Pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal perubahan status tanah wakaf oleh kepala sub Direktorat Agraria setempat .

- c. Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Sub. Direktorat Agraria setempat.²

Kewajiban nadzir menurut kompilasi hukum Islam pasal 220 dan pasal 7 PP No. 28 Tahun 1997-sebagai berikut:

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan Dan camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.³

KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebagai lembaga Keagamaan milik negara, seperti KUA kecamatan lainnya salah satu tugas yang diembannya adalah masalah Kemesjidan dan Perwakafan, untuk kemudahan dalam menjalankan tugas khususnya masalah perwakafan maka untuk mengurus harta wakaf diserahkan kepada nazhir (orang yang berhak mengurus dan mengelola harta wakaf)⁴.

² Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 43

³ Drs. Ahamad Rofiq, M.A. Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet-ke 3, h. 502

⁴Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, , *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, (Jakarta: 2004 th), h. 43

Nadzir sebagai lembaga keagamaan yang bertugas mengurus harta wakaf memiliki tugas dan kewajiban yang harus di perhatikan dalam menjalankan tugas yang ia emban agar harta wakaf yang ia kelola bermanfaat dan dapat di rasakan oleh orang banyak, karena sebagaimana dikatakan bahwa semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari benda wakaf maka semakin besar pahala yang akan diterima oleh si wakif. Namun pengelolaan terhadap harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar masih terkesan kurang maksimal. Kadang kala nadzir hanya sebagai pelengkap dan terkesan asal-asalan, hal ini terjadi karena nadzir yang di berikan tugas untuk mengurus harta wakaf bukanlah orang yang memiliki kemampuan untuk itu, dan terkadang nadzir yang ditunjuk oleh siwakif tidak melaksanakan tugasnya sebagai pengelola (mengurus) harta wakaf.

Dalam melaksanakan tugasnya terkadang nadzir mengalami kesulitan hal ini karena kebanyakan harta wakaf berbentuk tanah dan pada umumnya tanah tersebut digunakan untuk membangun mesjid, sedangkan nadzir yang ditunjuk oleh wakif ketika pembangunan ataupun pengelolaan mesjid tidak termasuk bagian dari pengurus. Sehingga ia tidak bisa berbuat banyak padahal di dalam Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah dikatakan bahwa nazhir merupakan orang ataupun lembaga yang tugasnya mempertahankan serta mengembangkan harta wakaf.

Nadzir yang ditunjuk oleh wakif kadang kala hanya berkerja sebagai penerima harta wakaf, setelah serah terima harta wakaf di lakukan Nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti apa yang ditulis dalam

Undang-Undang, para Nadzir yang mengelola harta wakaf baru bekerja sebatas minimal sehingga apa yang direncanakan oleh siwakif terkadang belum bisa tercapai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dendi Irawan, MA,⁵ seorang pegawai KUA Kecamatan Kampar Timur dimana katanya Undang-Undang yang ada masih belum bisa dijalankan dengan sepenuhnya sehingga dalam menjalankan tugasnya Nadzir masih belum maksimal, dan yang menjadi dasar dari semua ini, banyak di antara Nadzir wakaf yang telah ditunjuk tidak termasuk kedalam pengurus pembangunan, kalau harta wakaf tersebut berbentuk tanah dan di gunakan untuk bangunan ummat. Sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak, dan di saat seperti inilah para Nadzir terkesan sebagai penonton. Padahal kalau dikembalikan kepada Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan aturan agama Islam yang ada maka nabhirlah yang seharusnya melaksanakan semua ini.⁶

Tidak tercapainya pemanfaatan harta benda wakaf di Kecamatan Kampar Timur secara Optimal juga di Latarbelakangi oleh Sumber Daya manusia yang di miliki para nadzir yang tidak memadai, hal ini disebabkan para nadzir yang terdaftar di KUA Kecamatan Kampar Timur mayoritas tamatan Aliyah sederajat sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf terkesan tidak profesional.

⁵ Dendi Irawan, MA, Pegawai Kua Kecamatan Kampar Timur, *Wawancara*, (Kampar Timur, Tanggal: 27 Sept 2009).

⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Loc.Cit*

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta benda wakaf oleh nadzir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta benda wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan sering membebani dan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nadzir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme nadzir secara umum dipersyaratkan menurut fiqh yaitu beragama islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa), dan aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sipat amanah, jujur dan adil.

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa nadzir menempati pada pos yang sentral dalam pola pengelolaan harta benda wakaf. Di tinjau dari tugas nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan. Jelas berfungsi atau tidaknya tergantung pada nadzir yang mengelolanya.

Berikut addalah tabel pendapat pengurus masjid pada kinerja nadzir pada 10 masjid di Kecamatan Kampar Timur.

TABEL I
PENDAPAT PARA PENGURUS MASJID TENTANG TUGAS YANG
DILAKSANAKAN PARA NADZIR

No.	Alternatif Jawaban	Frekwensi	Persentase
1.	sudah dilaksanakan sepenuhnya	2	20 %
2.	sudah dilaksanakan sebagian	3	30 %
3.	belum dilaksanakan	5	50 %
Jumlah		10	100%

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya 50 % dari jumlah pengurus yang mengisi angket menilai, bahwa kepedulian nadzir terhadap pelestarian harta dinilai masih sangat kurang, sedangkan 30 % dari mereka mengatakan sebahagian nadzir sudah menjalankan tugasnya, dan hanya 20 % dari mereka yang mengatakan kalau nadzir yang ada sudah menjalankan tugasnya sepenuhnya. Tetapi hal ini, tidak menjadi permasalahan yang besar bagi pengurus pembangunan masjid/mushalla, karena pengurus pembangunan telah mempunyai konsep dan langkah-langkah sendiri untuk melanjutkan pembangunan tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam

Dalam istilah barat, hukum Islam dikenal dua istilah, pertama *Islamic law*, yang penggunaannya lebih berat mengacu kepada *Asy-syari'ah al-Islamiyah*, kedua *Islamic jurisprudence*, sebagai terjemahan dari *Al-Fiqhi Al-Islami*. Dalam khazanah Islam kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang berbeda, meskipun keduanya terdapat hubungan dan tak dapat dipisah-

pisahkan. Hal ini karena *Asy-Syari'ah al-Islami* sepanjang perjalanan sejarahnya sebatas yang berhubungan dengan soal-soal hukum yang hanya dapat diaktualisasikan setelah mengalami persentuhan dengan *ra'yu* atau rasio manusia yang diformulasikan ke dalam term *Al-Fiqhi Al-Islami*,⁷

Paling tidak, hukum Islam mempunyai dua pengertian sebagai berikut :

1. Hukum Islam sebagai sinonim dari kata syari'ah yaitu norma-norma hukum yang diwahyukan oleh Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sumber pengenalan dari hukum Islam adalah dalam kitab suci Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits, antara lain dalam kitab *Al-kutub As-Sittah*.⁸

Hukum Islam sebagai sinonim dari kata fiqhi, yaitu norma-norma hukum hasil olahan syari'ah oleh para ulama Fiqhi merupakan resultant (hasil olahan) antara wahyu dan rasio, merupakan hasil usaha penerapan dari syari'ah oleh karena itu, hukum Islam dalam pengertian yang kedua merupakan resultant antara syari'ah dengan subsistem budaya, subsistem sosial, subsistem politik, subsistem ekonomi dan lingkungan fisik. Maka terdapat beberapa aliran atau mazhab mengenai hukum Islam. Mazhab yang dominan sekarang ini adalah *Mazhab* Hanafi, *Mazhab* Maliki, *Mazhab* Syafi'i, dan *Mazhab* Hanbali.

⁷ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), cet. Ke-1, h. 13

⁸ *Al-kutub As-Sittah* adalah enam kitab kumpulan hadits yang paling dihargai. Keenam Kitab tersebut, yang populer dengan *nisbah* kepada penghimpunnya, adalah Shahih Al-Bukhari (256 H/674 M), Shahih Al-Muslim (261 H/874 M), Sunan Ibnu Majah (273 H/885 M), Sunan Abu Daud (275 H/887 M), Sunan At-Tarmizi (279 H/891M), dan Sunan An-Nasa'i (303 H/914 M).

Dalam batasan masalah pada bab pertama, yang akan ditinjau dari sudut hukum Islam adalah bagai mana pengelolaan wakaf oleh nadzir di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam pengelolaan wakaf oleh nadzir di KUA Kecamatan Kampar timur ada sebahagian nadzir yang belum menjalankan amanah yang di embankan kepadanya dengan baik. Indikasi ini tercermin dari masih adanya nadzir yang hanya sekedar menjadi penerima benda wakaf dan tidak menjalankan tugasnya sebagai orang yang berhak mengelola dan memanfaatkan benda wakaf agar manfaat benda wakaf tersebut dapat dirasakan oleh orang banyak, ataupun tersalurkan kepada para *mustahiq*.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terlihat bahwa nadzir yang tidak menjalankan tugasnya sebagai mana yang tertulis dalam Undang-Undang ataupun seperti pendapat para ulama masih ada. Hal ini dapat disebabkan karena para nadzir yang ditentukan oleh wakif bukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan seperti apa yang disyaratkan oleh agama serta tidak memiliki SDM yang memadai, keadaan ini tentunya mempengaruhi nadzir dalam menjalankan tugas yang ia emban sehingga nadzir akan terkesan tidak bisa mengelola harta wakaf seperti harapan si wakif.

Meskipun demikian, masih ada sebahagian nadzir di KUA Kecamatan Kampar timur yang melakukan pengelolaan wakaf dengan baik (sesuai dengan peraturan agama ataupun dengan UU wakaf no 28 tahun 1977).

Tidak dipungkiri bahwa nadzir memiliki peranan yang sangat besar dalam mengelola harta wakaf karena ditangannyalah kewajiban itu dilakukan dengan baik dan benar. Untuk itu tidak berlebihan bila permasalahan ini mendapat sorotan yang besar dalam UU, sehingga diberikan ketentuan yang tegas. Masalah tugas nadzir dalam mengelola harta wakaf ini telah diatur dalam peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dalam Bab IV pasal 10 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang menyebutkan bahwa:

(1). Nadzir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:

- a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
- b. Memelihara tanah wakaf
- c. Memanfaatkan tanah wakaf
- d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil tanah wakaf
- e. Menyelenggarakan pembukuan / administrasi yang meliputi:
 - e.1 Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
 - e.2 Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
 - e.3 Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf

(2). Nadzir berkewajiban melaporkan:

- a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada kepala KUA

- b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya akibat ketentuan pasal 12 dan 13 peraturan ini sebagai diatur dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah
 - c. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan desember
- (3). Nadzir berhak pula melaporkan adanya salah seorang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) peraturan ini

Dengan demikian terlihat bahwa nadzir dalam pengelolaan harta wakaf memang harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bila tidak dilakukan dengan baik selain dapat melanggar hukum Islam sekaligus dapat diperkarakan dengan peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik

Dalam Islam telah dianjurkan dengan jelas tentang bagaimana cara nadzir dalam mengelola harta wakaf, bahkan didalam peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, disana juga ditentukan bagaimana kewajiban yang harus dijalankan oleh nadzir dalam mengelola harta wakaf. Para nadzir dituntut untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang telah dibebankan kepadanya, agar harta wakaf yang diberikan oleh siwakif bisa bermanfaat dan dapat dirasakan oleh orang banyak.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam pengelolaan wakaf oleh nadzir harus dilakukan dengan baik. Adapun pengelolaan wakaf dalam hukum Islam yang wajib dilakukan menurut ulama (al-Kubaisy) seperti yang dikutip dalam buku pola pembinaan lembaga pengelola wakaf (nadzir) yaitu: mengembangkan wakaf, melaksanakan hak-hak wakaf dan menjaganya, menyalurkan keuangan wakaf dan menyampaikan hak-hak mustahiq wakaf⁹.

Disamping itu para ulama juga berpendapat bahwa nadzir juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan wakaf oleh sebab itu harus mengelola wakaf itu secara baik dan hati-hati.¹⁰

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir di KUA Kecamatan Kampar Timur menurut penelitian yang penulis lakukan masih belum dilakukan dengan baik dimana para nadzir yang mengemban tugas belum bisa dikatakan bekerja dengan maksimal, para nadzir yang ada hanya terkesan menunggu bola, dalam artian tidak berupaya ataupun bekerja keras untuk memanfaatkan harta wakaf yang ada agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, didalam Islam setiap umatnya dituntut untuk bekerja keras apalagi seorang nadzir yang bertugas mengawasi harta wakaf yang berguna untuk kepentingan orang banyak hal ini dapat dilihat dalam QS. 94: 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

⁹Muhamamad Ubaid Abdullah al-Kubaisyi, *Op.Cit*, h. 187-203

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, h. 333

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh”¹¹.

Dalam ayat diatas walaupun tidak tertuju unntuk menjelaskan masalah nadzir wakaf secara khusus namun ayat tersebut menyebutkan bahwa seorang peminpin / nadzir harus manpu bekerja keras untuk memanfaatkan harta wakaf yang ada dibawah kekuasaanya agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat banyak¹²

Dalam islam amanah juga menunjuk pada syarat peminpin, termasuk didalamnya manajer / nadzir yang disebut al-Qur'an (QS. 28:26)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبْتَ اُسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya¹³

Dalam ayat diatas dikatakan bahwa dalam memilih peminpin (nadzir) setidaknya memperhatikan dua kriteria : *al-qawiyy* (kuat [memiliki otoritas /kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat menghadapi resiko]), dan *al-amin* (terpercaya [kemampuan etis dan juga manajerial])¹⁴dalam menjalankan tugas yang ia pikul.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang :CV Toha Putra, 1989), h. 1073

¹²Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Nazhir Profesinal Dan Amanah*, (Jakarta: 2005), h. 89

¹³Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 613

¹⁴Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Op. Cit*, h.83

Dalam Islam kata amanah menunjukkan pada kualitas ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya, seorang yang amanah adalah seorang yang professional yang mampu

menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen pada kode etik profesinya.¹⁵

Dengan begitu menurut penulis bahwa kinerja nadzir dalam pengelolaan wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur belum sesuai dengan hukum Islam. Hukumnya (haram), Hal ini menurut penulis karena nadzir yang ada masih belum amanah. Meskipun ada sebahagian kecil yang melaksanakan dengan baik dalam artian mereka telah melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya untuk mengelolah dan memanfaatkan harta wakaf untuk kepentingan orang banyak, sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat memusnahkan harta wakaf.

¹⁵ *Ibid*, h. 82

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis ketengahkan terdahulu dapat diambil kesimpulan:

1. Kinerja nadzir di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Belumlah optimal dilakukan hal ini disebabkan oleh Sumber daya Manusia yang di miliki oleh nadzir jauh dari yang di harapkan mengingat betapa pentingnya posisi nadzir sebagai penanggung jawab dalam perwakafan.
2. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh (nadzir) di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebahagian kecil ada yang menyalahi ketentuan hukum Islam, seperti seorang nadzir tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah menerima harta wakaf, dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahkan dapat digolongkan telah melanggar hukum Islam,

B. SARAN

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran sehubungan dengan kinerja nadzir dalam pengelolaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Adapun saran tersebut penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada KUA untuk bisa lebih memperhatikan masalah perwakafan ini dengan lebih giat lagi mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai perwakafan terhadap para nadzir agar nadzir lebih paham tentang fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai nadzir, serta dengan penyuluhan ini di harapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki oleh para Nadzir.
2. Hendaknya Nadzir bisa menjalin kerja sama dengan tokoh agama tempatan dalam pelaksanaan pemeliharaan harta benda wakaf ini, sehingga keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki nadzir bisa diatasi dengan cara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar Al-Jaziri, *Minhaj Al-Muslimin*, Beirut: Darul Fikri, tt
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,
Yogyakarta : Krapyak, tt
- Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Beirut: Darul Fikri, tt
- Daniels, Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Indonesia, 1986
- Departemen Agama RI, *pedoman pegawai pencatat nikah*, (PPN)
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*,
Jakarta : 2000
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang : CV Toha Putra,
1989
- Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan
penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf *Pola
Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf*, Jakarta: 2004
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: 2007
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di
Indonesia*, Jakarta: 2007
- Direktorat Urusan Agama Islam Depag RI, *Laporan hasil training pengelolaan wakaf
di Mesir*, 2001

Hasaan Langgulung, *Azas-azas Pendiddikan Islam*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra,
2000

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara: 2007, cet-1

Muhammad Ali Al-Syauqani, *Nailul Autar*, Beirut: Darul Fikri, 1953

Muhammad Dawud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas
Indonesia, 1988

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut ; Dar al Fikr, 1992 Juz II

Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, Beirut : Dar al Fikri, 1415/1995, Juz. VI

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1971, Jilid III

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Personalia KUA Kecamatan Kampar Timur	14
TABEL II	: Daftar KUA Kecamatan Kampar Timur.....	17
TABEL III	: Pendapat para pengurus masjid tentang tugas yang di laksanakan para nadzir.....	48

WAWANCARA

1. Apakah menurut anda nadzir yang ada sudah melaksanakan tugas dengan baik ?
2. Apa menurut anda yang membuat nadzir tidak bisa melaksanakan tugas dengan optimal?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap nadzir yang tidak melaksanakan tugas?
4. Perlukah menurut anda diadakan pelatihan untuk meningkatkan SDM nadzir?

BIOGRAFI



Turismanto Hadinata, Lahir di Bangkinang Kabupaten Kampar pada tanggal 09 Mei 1985 dari sepasang suami istri Mansur (Alm) dan Zumara. Anak ke enam dari enam bersaudara.

Pendidikan formal SDN 065 Perawang-Siak dan meneruskan pendidikan ke Pondok Pesantren Islamic Centre Al-hidayah Kampar (PPICA) Selama 7 tahun. Setelah itu meneruskan ke jenjang perguruan

tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (AH) Strata I.

Pada tahun 2009/2010 telah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan judul karya ilmiah *“Kinerja Nadzir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”* dengan Indeks Prestasi sangat memuaskan (3.33).

MOTTO “*Kesuksesan Tanpa Penderitaan Dan Linangan Air Mata Adalah Bohong*”